

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu merupakan daerah otonomi baru berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang mengembangkan semua potensi daerah untuk meningkatkan pendataan asli daerah. Sebagai daerah otonomi baru Kota Batu memiliki kewenangan atas pertumbuhan daerahnya. Wewenang ini diperoleh dengan melalui penyerahan segala urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah yang menerima wewenang otonomi. Menurut Riyadi, sebagaimana dikutip oleh Marcelina mengemukakan bahwa pemberian otonomi dapat mewujudkan pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, menampung partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat, menumbuhkan rasa mandiri kepada daerah, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan keperluan dan kebutuhan daerah. Salah satunya yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah penanganan bidang pertanian¹.

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar jika dibanding dengan sektor lainnya dalam perekonomian di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia seharusnya mampu menjadi peluang dalam mengembangkan sektor pertanian, sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat. Namun kenyataannya sektor pertanian di Indonesia masih kurang berkembang. Hal ini karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian, turunnya minat generasi muda di sektor pertanian dan sumber daya masyarakat khususnya kepada petani.

Dalam studi politik perkotaan sendiri mengkaji dengan melihat bagaimana permasalahan yang berlangsung di kota. Asumsi dasar ini mungkin relevan sehingga menunjukkan bahwa pendekatan politik perkotaan merupakan sebuah pendekatan penting, yaitu pemahaman

¹ Ambhika, Marcelina MD, Sarwono & Mohamad Makmur. 2013. "KAPASITAS PEMERINTAH KOTA DALAM PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN". Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 1, No 5. Hal 900-909

mengenai banyak hal penting yang mampu mempengaruhi konstelasi politik nasional, situasi perekonomian sebuah bangsa, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan sistem budaya dan nilai bangsa yang berawal dari berlangsungnya permasalahan di kota. Kota dianggap sebagai metafora yang mampu dijadikan sejarah maupun masa depan dan pembangunan struktur tradisional atas ruang khusus guna terjadi adanya kemungkinan revolusi dan harapan baru. Pengungkapan tersebut menunjukkan kota sangat berpengaruh besar, sedangkan pendekatan politik perkotaan ikut andil dalam melihat kebijakan politik yang diputuskan oleh politisi maupun kebijakan lainnya yang akan berhubungan dengan permasalahan perkotaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah memberikan kewenangan, keleluasaan kepada setiap daerah dalam mengembangkan pembangunan ekonomi dengan adanya potensi daerah², dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan³. Karena itu Pemerintah Kota Batu memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi daerahnya, yakni di sektor pertanian. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 pasal 7 ayat 1(a) tentang Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 (a) meliputi: Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pertanian, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal. Pemerintah menyadari bahwa perlu adanya upaya pembenahan dalam sektor pertanian. Meski sektor pertanian cenderung menurun, namun masih memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan, dan perekonomian daerah. Dalam pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pengembangan sektor pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah membuat kebijakan dalam upaya pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari permasalahan ekonomi politik. Ekonomi dan politik merupakan dua permasalahan yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan salah satunya. Pemerintah

² Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Pemerintah Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2012. “Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”.
 Di akses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/12TAHUN2012PP>

mempunyai tanggungjawab atas ketersediaan pelayanan publik yang lebih baik melalui pembangunan. Namun dalam proses pembangunan diperlukan adanya para pelaku dari sektor ekonomi guna mewujudkan keinginan pemerintah. Peran pemerintah dalam mengendalikan ekonomi tersusun dalam kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Secara umum peranan atau bentuk keterlibatan pemerintah terhadap ekonomi terbagi menjadi 4 yakni, mengarahkan ekonomi, redistribusi pendapatan, mengatur segala aktivitas ekonomi swasta serta pengadaan jasa dan barang untuk kepentingan umum⁴.

Kota Batu sebagai daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi Pertanian. Hal ini karena Kota Batu didominasi dengan kawasan-kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang berlembah, sehingga memiliki struktur tanah yang subur. Dengan keberadaan hutan, gunung dan hamparan lahan pertanian yang lebih mendominasi keruangan Kota Batu sangat sesuai dengan adanya perwujudan pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, lahan sawah dan pertanian bukan sawah mencapai 17.685,78 Ha⁵. Selain itu Kota Batu dikenal sebagai komoditas apel, agrowisata dan pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang digunakan untuk menanam tanaman sayur-sayuran, buah-buahan (seperti; strawberry, jeruk, apel, tomat, dan sebagainya), berbagai bunga, apotik hidup dan tanaman lainnya. Sehingga hal ini menjadi sebuah daya tarik dari segi wisata dan lingkungan hidup yang dapat untuk dijadikan nilai ekonomis.

Dalam studi ini lebih memfokuskan mengenai kapasitas dari Pemerintah Kota Batu dimana memiliki kewenangan dengan membuat program kebijakan sebagai bentuk perwujudan pengembangan hortikultura. Studi ini dapat dianggap penting karena kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Batu bertujuan guna berlangsungnya pembangunan sektor pertanian yang berlanjut sehingga dapat mendatangkan keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adanya wujud pengembangan sektor pertanian ini menjadi kebijakan yang nantinya membangkitkan perekonomian kota Batu dan mensejahterakan petani.

⁴ Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010. Hlm 271

⁵ BPS Kota Batu. "Total Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Batu (Ha), 2019". Di akses melalui <https://batukota.bps.go.id/statictable2020/0/5/14/729/total-luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kota-batu-ha-2019.html>

Otonomi Daerah Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan yaitu; Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Dari ketiga kecamatan tersebut, Bumiaji merupakan kecamatan terluas dengan luas 127,97 km² atau 64,28 persen dan terdapat banyak lahan pertanian⁶. Pemerintah Kota tidak dapat mengelola potensi pertanian dengan baik karena luasnya lahan pertanian yang ada di Kota Batu. Sehingga sektor pertanian mengalami penurunan dari segi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Tercatat dalam BPS Kota Batu, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sektor pertanian tahun 2019 mencapai 2,06 persen. Namun di tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan turun menjadi 1,74 persen. Dengan luas 202,3 km² Kota Batu dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang membuatnya menjadi asri dan menjadikan sebagai kota pariwisata berbasis pertanian.

Kecamatan Bumiaji menjadi wujud Pemerintah Kota Batu atas sektor pertanian. Bumiaji menjadi kecamatan yang dipilih untuk memfokuskan di bidang pertanian karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Selain itu kondisi cuaca Kota Batu yang sejuk karena berada di lereng pegunungan. Terdapat juga kelompok tani yang bercocok tanam menanam sayur-sayuran dan buah-buahan dengan hasil panen yang sangat baik. Bumiaji juga dijadikan sebagai wisata Desa Agro dimana banyaknya para wisatawan yang berkunjung. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung mampu menyumbangkan nilai PDRB sektor pertanian sebesar 22,36 persen di tahun 2010, namun ditahun 2019 nilai PDRB menurun menjadi 20,64 persen.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam pembangunan pengembangan sektor pertanian kota Batu mengalami hambatan yang sangat komplek. Hal ini dikarenakan adanya perubahan cuaca yang tidak dapat dipresidiksi sehingga cukup berpengaruh terhadap produktifitas pertanian, selain itu pengembangan sektor pertanian juga dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan pertama yaitu terjadinya penurunan luas lahan pertanian produktif yang diakibatkan oleh tingginya alih fungsi lahan. Kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM)

⁶ BPS Kota Batu. "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2019". Di akses melalui [https:// batukota.bps.go.id/statictable/2020/06/25/861/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kota-batu-2019.html](https://batukota.bps.go.id/statictable/2020/06/25/861/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kota-batu-2019.html)

yang terbatas. Ketiga, lahan pertanian yang mengalami degradasi sumber daya alam (SDA) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga perlunya revitalisasi lahan secara menyeluruh. Keempat, terbatasnya pengetahuan para petani dalam penggunaan teknologi modern dan akses pasar dimana hal ini sejajar dengan rendahnya akses permodalan pertanian⁷.

Sektor pertanian memiliki peran kontribusi terhadap pembangunan aktivitas ekonomi, mata pencaharian, dan cara dalam melestarikan lingkungan sehingga sektor pertanian menjadi instrumen unik dalam pembangunan. Sebagai aktivitas ekonomi sektor pertanian dianggap sebagai salah satu sumber pertumbuhan wilayah dimana sektor ini menjadi penyedia lahan untuk investasi kepada sektor swasta dan sebagai penggerak utama bagi industri yang berkaitan dengan sektor pertanian. Terkait dengan pertumbuhan wilayah, menurut Sukirno dalam permasalahan pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu; masalah pada pertumbuhan yang berasal dari perbedaan diantara tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai dengan pertumbuhan potensial yang bisa dicapai, masalah pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan potensi pertumbuhan itu meningkat sendiri, masalah pertumbuhan yang berkaitan dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun⁸.

Dinamika dalam pembangunan sektor pertanian sampai saat ini tidak menunjukkan hasil maksimal, apabila dilihat dari tingkat kehidupan dan kesejahteraan petani serta kontribusi pendapatan nasional. Hal ini terjadi karena sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Adanya kebijakan yang telah dibuat tidak menguntungkan bagi sektor pertanian. Program-program dalam pembangunan sektor pertanian yang ternyata tidak berarah dengan baik membuat sektor pertanian diujung kehancuran. Meski demikian sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menampung banyak tenaga kerja sehingga sebagian besar masyarakat masih bekerja dan bergantung penghasilan di sektor pertanian.

Terdapat faktor-faktor yang dapat dijabarkan dalam sektor pertanian sebagaimana harus adanya strategi penting dalam prosedur pembangunan, yaitu; dalam sektor pertanian tentu menghasilkan produk-produk yang akan sangat dibutuhkan oleh sektor lain sebagai input

⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun 2019.

⁸ Sadono, Sukirno. 2006. "Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan". Jakarta: Prenada Media Group.

mereka, terutama pada sektor bisnis (Agrobisnis) dan sektor industri (Agroindustri) dalam skala proposi yang besar. Hal ini karena sebagai tempat sasaran yang sangat besar untuk berbagai produksi dalam negeri yang khususnya pada produk pangan. Prosedur pembangunan yang baik mampu menghasilkan berbagai produk pertanian yang berpotensi akan keunggulan komperatif yang baik bagi kepentingan substitusi impor maupun ekspor.⁹

Banyaknya permasalahan dalam pengembangan sektor pertanian sangat membutuhkan adanya perhatian khusus dan upaya yang lebih dari pemerintah kota. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Batu melakukan kajian dan pemetaan kembali terhadap permasalahan di sektor pertanian yang bertujuan agar dapat merumuskan perencanaan bersifat berkelanjutan. Maka perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian nantinya akan di muat dalam Rencana Startegis (Rensta) Dinas Pertanian¹⁰.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kotas Batu, terciptalah kebijakan yang berisi program-program untuk mewujudkan pengembangan sektor pertanian dimana program tersebut merupakan program dengan kegiatan unggulan yang ditetapkan pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Batu tahun 2017-2022 yaitu dengan adanya Revitalisasi pertanian dan Pertanian Organik. Program kebijakan yang menjadi program unggulan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengembangan sektor pertanian agar bangkit dan menjadi salah satu penghasil perekonomian daerah yaitu dalam; memajukan produksi pertanian secara makro, menaikkan kualitas produk serta sumber daya manusia di sektor pertanian dengan upaya memajukan daya saing produk beserta kemandirian, dan menghidupkan kembali pembangunan perekonomian daerah di sektor pertanian¹¹.

Upaya dalam mencapai target perwujudan pengembangan sektor pertanian tentu tidak mudah karena harus diharapkan dengan keadaan permasalahan dan tantangan pengembangan sektor pertanian yang tidak gampang. Permasalahan dalam sektor pertanian juga terdapat pada gerak dinamika lingkungan lokal, regional, dan internasional yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi sektor pertanian yang seperti ini dan untuk mewujudkan pengembangan sektor pertanian, maka Pemerintah Kota Batu menggandengan

⁹ Tambunan E. R. 2009.”Respon Pertumbuhan Bibit Kakao (*Theobroma cacao* L.) Pada Media Tumbuh Subsoil dan Aplikasi Kompos Limbah Pertanian dan Pupuk Anorganik”. Fakultas Pertanian Pasca Sarjana. Univerisitas Sumatera Utara. Medan.

¹⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun 2019.

¹¹ Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun 2017–2022.

berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari petani mandiri (masyarakat pengelola pertanian milik pribadi) dan kelompok tani dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan agar seluruh elemen masyarakat dapat turut andil dan saling bekerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah melalui pembangunan pengembangan sektor pertanian. Dengan kapasitas Pemerinta Kota Batu dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pertanian serta mampu memberikan kesejateraan bagi petani-petani di Kota Batu.

Dalam pengejaan peneliatian ini membutuhkan peninjau dari hasil penelitian terdahulu yang sejenis sebagai studi terdahulu mampu dijadikan bahan acuan dalam mengkaji fokus pembahasan. Oleh karena itu dirasa penting untuk menyajikan peneletian terdahulu sebagai berikut.

Pertama, penelitian Asori tahun 2014 dengan judul *“Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus”*. Dalam penelitian ini menganalisis tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus agar dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman perangkat desa dalam memahami manajemen sumber daya manusia (SDM) dan kurang mampunya perangkat desa dalam urusan teknis. Mayoritas dari perangkat desa belum mengikuti pelatihan, pendidikan, sosialisasi teknik kompetensi, hal ini keran perangkat desa merasa sudah berkerja selama 10 dan merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai¹².

Kedua, Condro Joko tahun 2016 dengan judul *“Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Pertanian Kentang di Desa Banaran Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”*. Dalam penelitian ini menganalisis tentang Indonesia yang melakukan impor kentang dalam memenuhi permintaan pasar, dimana perlunya inovasi baru dalam budidaya kentang dan mengembangkan sektor pertanian. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini inovasi yang diberikan kepada petani berupa bibit unggul yang akan di

¹² Asori. 2014. *“Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa di Kabupaten Kudus”*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri

budidaya, dimana nantinya akan meningkatkan produksi kentang. Dalam pelaksanaan inovasi tersebut sudah diterapkan oleh petani, dengan melihat tingkatan komoditas yang berlaku sesuai dengan kapasitas para petani, agar petani mampu melakukan perubahan baik dalam pengelolaan, jenis tanaman yang akan di budidaya, serta mampu menghasilkan produksi yang sangat berkualitas¹³.

Ketiga, Luvia tahun 2020 dengan judul “*Manajemen Pemerintah Daerah: Studi Tentang Kapasitas Pemerintah Daerah Pacitan Dalam Mengatasi Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017*”. Dalam penelitian ini menganalisis tentang kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di tahun 2017 yang terjadi hampir diseluruh Kabupaten Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini melihat bahwa kapasitas agensi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sudah cukup optimal. Dapat dilihat dari keterlibatan relawan dari relasi yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pacitan dengan beberapa organisasi masyarakat yang terjalin di Forum Relawan Risiko Bencana. Sedangkan kapasitas sistem pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sudah berjalan optimal, output kebijakan-kebijakan yang dibuat melalui surat keputusan Bupati sudah terstruktur dan terorganisi dalam pelaksanaan penanggulangan darurat bencana yang berjalan secara efektif dan efisien¹⁴.

Dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian penulis dengan judul “*Kapasitas Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Hortikultura: Perspektif Politik*” menganalisis kapasitas Pemerintah kota dalam kebijakan yang telah dibuat untuk pengembangan subsektor hortikultura, respon petani terhadap keputusan kebijakan Pemerintah Kota, dan pengaruh hortikultura terhadap perekonomian kota Batu. Jadi penelitian ini tidak hanya fokus terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga respon dari petani yang ikut andil dalam mengembangkan sektor pertanian dan melihat dari perekonomian daerah dari sisi sektor pertanian. Penelitian

¹³ Joko Condro, Kirono. 2016. “Inovasi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Pertanian Kentang di Desa Banaran Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi Thesis. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Diakses melalui <http://repo.apmd.ac.id/242/>

¹⁴ Lananingtyas Luvia, Kusuma. 2020. “*Manajemen Pemerintah Daerah: Studi Tentang Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Dalam Mengatasi Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017*”. Skripsi Thesis. Universitas Airlangga. Diakses melalui <http://repository.uanir.ac.id/100603/>

ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Diharapkan dalam penelitian mampu menjawab berbagai analisa yang sudah ditentukan.

1.2 Permasalahan Penelitian

1. Bagaimana Pemerintah Kota Batu mengembangkan potensi pertanian hortikultura?
2. Bagaimana respon petani terhadap upaya pemerintah Kota Batu dalam mendukung pengembangan pertanian hortikultura?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya-upaya dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu dalam pengembangan pertanian hortikultura
2. Mengetahui respon petani hortikultura terhadap upaya pengembangan pertanian hortikultura

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Guna membagikan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan Dinas Pertanian dalam mengelola sektor pertanian agar dapat kembali berkembang sehingga bisa mensejahterakan masyarakat khususnya yang bekerja pada sektor pertanian.

1.4.2 Manfaat Akademis

Guna menambahkan pengetahuan terkait fokus kajian dalam ilmu politik yang khususnya mengenai kebijakan pemerintah kota dan memberikan peluang untuk mengkaji permasalahan yang sama secara mendalam kepada siapapun serta menjadi lebih intensif agar tulisan ini dapat dibaca oleh siapapun sehingga bisa memperoleh informasi yang dicari dan diinginkan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Kapasitas

Istilah kapasitas yang beragam pengertian tergantung kepada siapa yang mengatakannya dalam konteks apa istilah akan digunakan. Sudut pandang Morgan dalam Soeprapto yang mengatakan kapasitas merupakan kemampuan, pemahaman, sikap, ketrampilan, nilai-nilai, perilaku, hubungan, sumber daya, motivasi serta kondisi yang memungkinkan terhadap individu, organisasi, jaringan kerja, dan sistem yang lebih luas guna melaksanakan tujuan-tujuan mereka dalam mencapai wujud pembangunan yang diharapkan dari waktu ke waktu. Dalam United Nation Development Programme (UNDP) menurut Soeprapto menjelaskan bahwa kapasitas bisa diartikan dengan kemampuan individu maupun organisasi ataupun unit-unit organisasi lainnya untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks sistem, kapasitas diartikan sebagai entitas bekerja dalam mencapai tujuan bersama dengan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Sedangkan menurut Brown dalam Soeparto menjabarkan tentang kapasitas menjadi proses yang meningkatkan kemampuan individu, organisasi dan sistem-sistem dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan¹⁵.

Selanjutnya Freddy Rangkuti yang menjelaskan bahwa kapasitas menjadi tingkat kemampuan dalam produksi secara optimum dari fasilitas biasa yang ditanyakan sebagai output dari suatu periode tertentu. Namun menurut Grindle, sebagaimana dikutip oleh Zohra mengemukakan bahwa kapasitas terbagi menjadi tiga dimensi yakni¹⁶:

1. Dimensi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang berfokus pada personil profesional dalam kemampuan teknis dan tipe kegiatan seperti:

¹⁵ Soeprapto, Riyadi. 2006. "The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance". Di akses melalui

https://www.academia.edu/27736869/The_Capacity_Building_For_Local_Government_Toward_Good_Governance

¹⁶ Zohra. 2018. "Analisis Capacity Building Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Enrekang". Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar

adaya pelatihan, praktik secara langsung, kondisi lingkungan kerja serta rekrutmen pekerja.

2. Dimensi penguatan organisasi, yang berfokus dalam tata management dalam meningkatkan suatu keberhasilan fungsi, peran, dan tipe kegiatan seperti: budaya organisasi, sistem intensif, komunikasi struktur manajerial dan perlengkapan personil kepemimpinan.
3. Dimensi reformasi kelembagaan, yang berfokus pada kelembagaan dalam sistem makro struktur dan tipe kegiatan seperti: perubahan kebijakan, aturan main politik dan ekonomi, serta reformasi konstitusi.

Pemahaman mengenai kapasitas dapat dikatakan terbatas dalam aspek manusia saja (*human capacity*). Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah, hal ini karena SDM yang memiliki kualitas terbaik dapat mendorong kemampuan dalam non-manusia secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa kemampuan suatu daerah yang komprehensif tidak hanya dilihat dari kapasitas SDMnya, namun bisa dilihat dari kapasitas non-manusia (*non human capacity*), seperti sarana prasarana, keuangan dan infrastruktur. Terdapat tiga elemen penting untuk kapasitas yakni:

1. Kebijakan kapasitas, yang merupakan kemampuan dalam mengkoordinasikan antara lembaga pemerintah, proses pengambilan keputusan dan membuat analisis terhadap keputusan.
2. Implementasi kewenangan, merupakan kemampuan dalam menegakan dan menjalankan kebijakan yang dibuat baik terhadap pemerintah sendiri maupun masyarakat, serta dapat menjamin pelayanan umum untuk masyarakat diterima dengan baik.
3. Operasional efisien, yang menjadi kemampuan guna memberi pelayanan umum secara efisien dan efektif dengan kualitas yang memadai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapasitas menjadi suatu kemampuan yang dimiliki individu, organisasi, maupun sistem yang melaksanakan fungsi-fungsi secara efisien, efektif dan berkelanjutan sesuai aturan-aturan yang berlaku guna

mencapai tujuan bersama dalam pembangunan serta kapasitas yang terbagi tiga elemen penting yakni, kebijakan kapasitas, operasional efisien, serta implentasi kewenangan.

1.5.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menjadi salah satu sistem penyelenggara pemerintahan. Selain itu pemerintah daerah sebagai otoritas administratif daerah yang lebih kecil cakupannya dari negara, sebagaimana Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Provinsi yang terbagi atas kota dan kabupaten. Dimana setiap provinsi, kota dan kabupaten memiliki peemrintah daerah yang telah di atur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pemerintah daerah sebagai kepala daerah bagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam memimpin pelaksanaan segala urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom¹⁷. Sedangkan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara segala urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menurut asas otonomi serta tugas pembantun atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip NKRI yang telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan The Liang Gie, sebagaimana dikutip oleh Fadlan yang mengatakan bahwa pemerintah daerah merupakan satuan organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan segala kepentingan dari kelompok yang berada di suatu wilayah dan dipimpin oleh pemerintaahan daerah¹⁸.

Setiap pemerintahan daerah tentu dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih dengan cara demokratis. Kepala daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta melakukan publikasi terbuka atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pemerintahan daerah

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia. 2014.” Pemerintah Daerah”. Di akses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

¹⁸ Fadlan. 2019. “PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR UNTUK PENENTUAN KEBIJAKAN MENGELOLA PORENSI KEBERAGAMAN”. Jurnal. Vol 2, No 1. Hal 51

mengurusi pelaksanaan asas desentralisasi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab daerah. Dalam hal menyangkut pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pembiayaan kebijakan, demikian perangkat daerah yakni dinas-dinas daerah.

Menurut Rianto selain itu pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan yang dimaksudkan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yakni untuk melakukan¹⁹;

1. Dekonsentrasi yakni penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
2. Desentralisasi yakni menjalankan segala urusan yang semula menjadi wewenang pemerintah daerah guna mengelola dan menangani urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
3. Tugas pembantu yakni menyelenggarakan segala penugasan dari pemerintah kepada daerah dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten dan desa serta pemerintah kota/kabupaten kepada desa guna melaksanakan tugas tertentu.

Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan segala kegiatan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang asas otonomi. Pada dasarnya prinsip dari kebijakan otonomi daerah dilaksanakan agar wewenang pemerintah tidak terpusat, dimana dilaksanakan secara desentralisasi ke seluruh kewenangan yang ada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan baik semestinya. Kapasitas jika dimaknai secara umum merupakan kemampuan dalam menjalankan fungsi, tugas pokok, menargetkan/mencapai tujuan, dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memumpuni serta dinilai cukup baik dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang di embannya.

1.5.3 Pemerintah Dalam Perekonomian

¹⁹ Nugroho, Rianto. 2000. "Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)". Jakarta: Media Komputindo Kelompok Gramedia. Hlm 90.

Dalam pemikiran sebelumnya negara (pemerintah) memiliki peran menjaga ketertiban dan keamanan, atau menjadi lembaga yang memiliki tugas menyelesaikan berbagai konflik kepentingan diantara kekuatan sosial. Akan tetapi dalam konsep ekonomi politik dijelaskan bahwa peran sesungguhnya negara (pemerintah) yakni dalam jalannya ekonomi. Ada tiga pandangan dalam politik yang dapat disangkutkan dengan ekonomi, yakni politik selaku pemerintahan, politik selaku kehidupan publik, serta politik selaku pengalokasian nilai oleh pihak berwenang²⁰.

Hubungan ekonomi dan politik dibagi menjadi dua bagian, politisme atau kebijakan umum yang memandang politik menetapkan ekonomi dan ekonomes yang melihat ekonomi menetapkan politik. Sebagai bentuk dari peran pemerintah dalam keberlangsungan perekonomian dilakukannya dengan memberi pengarahan secara langsung, seperti pemerintah mewajibkan pelaku-pelaku usaha untuk menaati kebijakan yang terleah dibuat. Sedangkan pengarahan secara tidak langsung, seperti pemerintah tidak mewajibkan kepada pelaku-pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pengarahan tidak langsung ini dapat diterapkan pada empat kebijakan ekonomi, yakni kebijakan perdagangan, kebijakan perbankan dan kredit, kebijakan investasi modal dalam negeri maupun luar negeri dan pengeluaran negara²¹.

Dalam pendekatan ekonomi politik Keynesian menekankan kritik konsep pasar yang mendekrit dirinya karena banyak digunakan oleh pemikir neo klasik dan klasik yang menganggap dengan membiarkan pasar tanpa adanya campur tangan dari negara (pemerintah). Kritikan ini ditujukan untuk permasalahan yang bersifat terpusat dari ekonomi politik, yakni tujuan sosial serta batas-batas property sistem/sistem kepemilikan. Keynes beranggapan bahwa apabila pasar mengalami kegagalan maka negara (pemerintah) ikut turun tangan dalam perekonomian, namun apabila pasar dan perekonomian mulai kembali stabil maka negara (pemerintah) sudah harus lepas tangan dan kembali ke posisi semula²².

1.5.4 Kesejahteraan Petani

²⁰ Caporaso, James A & David P. 2008. "Teori–Teori Ekonomi Politik, Terj Suraji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.4.

²¹ Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010. Hlm 272

²² Caporaso, James A & David P. 2008. "Teori–Teori Ekonomi Politik, Terj Suraji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.4

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, dari aspek ketenagakerjaan sebagian besar tingkat kemiskinan di Indonesia bekerja di sektor pertanian, khususnya di pedesaan. Hampir sebanyak 46,30% (persen) menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan nilai *HCI (Head Count Index)* atau presentase penduduk miskin yang sumber penghasilan 12,52% (persen), karena dari 27,55 juta penduduk miskin pada bulan Maret 2020²³. Hal ini merupakan keadaan ironi sebagaimana petani menjadi produsen pangan utama nasional yang tentu berperan penting pula pada pembangunan nasional. Burki dalam Suryana (2010) mengatakan setidaknya terdapat enam faktor penyebab kemiskinan yang masih saja melekat di sebagian penduduk desa yang bekerja sebagai petani, yakni;

1. Terjadinya kelambanan pada pertumbuhan ekonomi
2. Tidak adanya kemajuan pada produktivitas tenaga kerja atau dapat disebut dengan stagnasi
3. Rendahnya tingkat pendidikan formal
4. Tingginya tingkat pengangguran
5. Kerusakan lingkungan yang membuat menipisnya sumber daya alam

Dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perlunya kesejahteraan petani yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pertanian sebagaimana sektor pertanian ini menjadi penggerak utama perekonomian. Hal ini karena syarat-syarat pokok pertanian seharusnya dipenuhi terlebih dahulu guna proses pembangunan pertanian berjalan dengan lancar, syarat-syarat pokok yakni: lahan, tenaga kerja dan basis ekonomi lokal. Apabila dari syarat-syarat pokok tidak dapat dipenuhi akan membuat proses pembangunan pertanian terhambat dan tidak akan berjalan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Rezim Perkotaan (Urban Regime Theory)

²³ BPS. "Karakteristik Rumah Tangga menurut Status Kemiskinan 2020". Di akses melalui <https://www.bps.go.id/indicator/23/207/1/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html>

Wilayah perkotaan menjadi sebuah wilayah yang diperumpamakan Teori Rezim Perkotaan (Urban Regime Theory) sebagai bahan kajian pada tahun 1976 dimulai dengan munculnya perdebatan mengenai teori rezim perkotaan yang telah ada di Eropa, dimana teori tersebut sudah digunakan untuk menilai suatu kota sebagai wilayah yang sudah atau belum dalam melaksanakan fungsinya guna mensejahterakan rakyat dan melayani pelayanan sosial. Fainstein pernah menggunakan pendekatan rezim perkotaan untuk mengilustrasikan lingkungan kekuasaan yang berada dalam administrasi pemerintahan Amerika. Pada tahun 1980 pendekatan tersebut lebih cenderung sebagai pendekatan ekonomi politik perkotaan.

Politik perkotaan memiliki beberapa keterkaitan dengan: pertama, bagaimana kota bisa mengelola kewenangan politik yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan adanya fragmentasi dalam kewenangan yang sudah di bangun dan bagaimana kota bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama bagaimana pemerintah bisa berjalan berdasarkan kekuasaan yang ada, bagaimana fungsi birokrasi bisa berjalan dalam pemerintahan, dan siapa saja yang ikut terlibat dalam memerintah. Kedua adanya kaitan erat dengan peran elite politik perkotaan serta bagaimana kepercayaan masyarakat kepada elite tersebut dan bagaimana permasalahan perkotaan bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ketiga, menjadi salah satu bentuk partisipasi, masyarakat sehingga memiliki peran sebagai control agar dapat tercapainya tujuan bersama.

Teori rezim perkotaan muncul pertama kali di pertengahan tahun 1980-an²⁴. Teori rezim ini menjadi salah satu kekuatan teoritis yang relative baru sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pengembangan yang berasal dari studi tentang pluralism dan elitism. Dalam teori rezim perkotaan memiliki kerangka kerja yang digunakan dalam analisis untuk menangkap tata kelola pemerintah sebagai aspek kuncinya. Sebagaimana teori ini memiliki fokus untuk aktor-aktor yang ada dalam struktural institusi pemerintah. Teori rezim perkotaan memiliki pandangan bahwa dalam organisasi politik ikut menyebabkan control populer sehingga kurang memadai dan membuat pemerintah kurang responsif dalam keadaan sosial serta ekonomi dikalangan

²⁴ Garry Stoker, David Judge, dan Horald Wolmand. 1995. "Theory Of Urban Politic". London: Sage Publication.

ekonomi tertentu. Menentukan sebuah keputusan politik di pemerintahan tentu ada beberapa pihak yang sangat berpengaruh yaitu institusi pemerintah dan aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan terkait. Hal ini berbeda dengan pandangan teori elit, teori rezim perkotaan mengungkapkan tidak memungkinkannya jika terjadi kontrol komprehensif dapat dilaksanakan sebuah kelompok.

Istilah rezim dikembangkan tahun 1980-an, terkenal dengan sebutan aturan yang dibentuk oleh pemerintah dimana pada perkembangannya dianggap sebagai sebuah kerjasama antar institusi. Teori ini digunakan sebagai penjelasan relasi yang menjalin dengan sesama elit politik dan elit ekonomi di sebuah proses saat pengambilan keputusan. Hal ini karena teori rezim perkotaan terlahir sebagai teori yang menggambarkan suatu hubungan aspek politik dan aspek ekonomi dalam pemerintahan. Sebagaimana teori ini digunakan menjelaskan bagaimana sebuah keputusan politik yang telah diputuskan oleh pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota tersebut.

Pentingnya dalam memahami politik dan perubahan politik sebagai penyebab aktivitas serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga berkaitan dengan konteks dilingkup perkotaan. Jika melihat politik secara konseptual, politik merupakan suatu proses dimana politik bukan hanya hasil dari kebijakan namun tidak terlepas juga terdapat variabel lainnya seperti bagaimana proses distribusi kewenangan dan kekuasaan, hak istimewa yang hanya dikhususnya untuk para elit, dan kepercayaan masyarakat. Untuk melihat permasalahan yang terjadi di kota maka dapat melihat fungsi yang ada dipemerintahan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga pemerintah dapat membangun koalisi, transformasi, konsolidasi serta melaksanakan kepemimpinannya.

Analisis dalam teori ini telah memandang kekuasaan sebagai suatu hal yang dapat terfragmentasi. Hal ini karena rezim terkait dengan pengaturan yang memiliki sifat kolaboratif dimana pemerintah dan pelaku swasta membentuk sebuah pola hubungan tertentu terkait dengan adanya kapasitas memerintah yang dimiliki oleh pemerintah. Adapun alasan utama yang menjadi terjadinya fragmentasi dalam rezim adalah karena

diakibatkan dengan adanya pembagian kerja diantara Negara dan pasar²⁵. Sehingga keberadaan rezim dalam sebuah kebijakan pembangunan perkotaan dipandang dapat menjadi sebagai suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan juga para pelaku bisnis yang memiliki legitimasi dalam menentukan proses pembuatan kebijakan. Kondisi tersebut membuat Stone menggambarkan bagaimana regime teori ini sangat kental dengan perspektif politik ekonomi yang telah menolak asumsi pluralis yang memadam pemerintah sebagai otoritas yang memadai dalam menentukan, membuat dan melaksanakan kebijakan secara mandiri, serta asumsi strukturalis yang telah menyatakan bahwa kekuatan ekonomi yang menentukan kebijakan²⁶.

Dengan demikian, analisa yang disediakan oleh urban regime theory menurut Stone adalah suatu upaya agar dapat "mengeksplorasi atau menjelajah jalan tengah antara" konseptualisasi rezim yang dianggap sebagai "organism" yang berada diantara variabel kausal dalam ruang proses dan hasil kebijakan. Namun, meskipun analisa rezim ini menunjukkan adanya keberadaan aktor-aktor yang berupaya memediasi tekanan eksternal seperti dengan perubahan ekonomi terhadap proses kebijakan dan hasilnya, tetapi fokus dalam analisis rezim terutama di tujukan pada dinamika internal bangunan antar koalisi baik itu terjadi kerjasama antar kalangan sipil maupun model koordinasi dan adanya interaksi lintas kelembagaan pemerintah²⁷.

Stone sendiri menempatkan sebuah kebijakan pembangunan kota dapat terkait dengan adanya tentang "power" sebagai produk sosial yang berasal dari pertemuan dua kekuasaan, yaitu kekuasaan sistemik dan kekuasaan pre-emptive power. Stone juga telah menekankan adanya aspek-aspek kekuasaan pre-emptive agar dapat menantang hegemoni ideolog yang menjadi sebuah penjelasan atas karakteristik rejim yang telah dideskripsikan sebagai "social control paradigm" artinya memiliki kaitan dengan structuralism. Dalam pemahaman ini Stone akan mengajukan sebuah model

²⁵ Elkin, S. L. 1987. "City And Regime In The American Republic". University of Chicago Press. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/227643282_Urban_Regime_Theory_A_Normative-Empirical_Critique

²⁶ Stone, C. N. 1993. "Urban Regimes And The Capacity To Govern: A Political Economy Approach. Jurnal of Urban Affairs. Hal 249-260. Diakses melalui https://mesopolhis.fr/wp-content/uploads/2022/03/2.-Stone-1993-Journal_of_Urban_Affairs-2-1.pdf

²⁷ *Ibid.*

produksi power atau sosial, dimana pemerintah harus membutuhkan suatu penyelesaian dan melihat adanya sekutu yang tepat untuk hal tersebut²⁸.

Masih dengan menurut pandangan Stone, dimana orang-orang mengorganisasikan diri dengan melakukan upaya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil yang ada, membandingkan insentif dengan cara lebih selektif, tujuan, hingga penyelesaian. Bergulirnya waktu, para aktor ini berupaya agar dapat merespon secara cepat peluang dan tantangan yang ada. Jika kekuasaan tersebut memiliki terkait dengan kemampuan yang mampu menyelesaikan sesuatu, maka menyelesaikan sesuatu tersebut akan terkait dengan suatu peluang kecil. Oleh karena itu, fokus pengamatan penting ada proses yang dapat dikembangkan oleh Stone, yaitu salah satunya adalah pada tahap proses agenda setting. Hal ini guna untuk menunjukkan bahwa agenda setting merupakan sebuah titik penting yang sangat berpengaruh pada signifikan wujudnya kebijakan yang nantinya akan dihasilkan oleh pemerintah. Dalam proses agenda setting tersebut, Stone lebih menggunakan model dari “Tillian” yang membahas tentang terjadinya koherensi sosial yang rendah, sebagaimana tidak ada satupun ideologi yang dominan, bahkan ketika mereka telah mendominasikannya secara politik²⁹. Dalam pemahaman ini, adanya sebuah ruang yang digunakan untuk berbagai interpretasi dan pemaknaan atas pembangunan dan kesejahteraan sebagai sebuah perihal utama yang harus dilakukan dan ingin dituju ke suatu kebijakan pembangunan dari pemerintah, termasuk pemerintah kota.

Teori rezim perkotaan dianggap sebagai teori yang melihat “produksi sosial” merupakan sumber kekuasaan. Teori ini mengganti sebuah konsep “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk”. Hal ini karena teori rezim perkotaan tidak melihat siapa yang memegang kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan tersebut bisa direpresentasikan guna mencapai tujuan bersama³⁰. Berdasarkan pernyataan tersebut maka, teori ini berfokus tidak lagi kepada siapa yang berkuasa, tetapi kepada dan bagaimana koalisi tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Menurut Stone efektifitas pemerintah daerah tergantung bagaimana

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Garry Stoker, David Judge dan Horald Wolmand. 1995. “Theory Of Urban Politic”. London: Sage Publication.

kerjasama yang terjadi antara pemerintah dan non-pemerintah (swasta maupun masyarakat). Sehingga dalam pengemplantasian terdapat visi yang menjadi gabungan dari beberapa visi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang ikut andil dalam koalisi tersebut³¹.

Dengan kata lain teori rezim perkotaan merupakan teori yang menilai kekuasaan yang ada di daerah bisa terjadi jika adanya hubungan kerjasama baik itu dilakukan oleh pemerintah dengan non-pemerintah (swasta maupun masyarakat). Teori ini dijadikan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemerintah yang dianggap selaku pemegang kekuasaan yang ada di kota dengan non-pemerintah dalam membangun perkotaan. Adanya teori ini bisa dijadikan sebagai pedoman yang diharapkan mampu menjadikan kota lebih maju. Karena pertumbuhan kota juga tergantung dengan tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh rezim sehingga hal tersebut dapat membawa kota agar menjadi lebih maju ataupun semakin menurun. Kesejahteraan masyarakatnya pun bisa dicapai jika rezim tersebut mampu menjalankan visi-misi pembangunan kota dengan baik.

Kekuasaan dalam rezim dibagi menjadi dua kelompok elit, yakni elit pemerintah yang menjadi aktor pemegang kekuasaan di wilayah atau kota, dan elit ekonomi yang menjadi pemilik modal yang membantu pembangunan kota yang sedang berlangsung. Seperti yang diketahui bahwa rezim dapat terjadi apabila terjadinya sebuah hubungan kerjasama diantara kedua pihak dengan tujuan agar mencapai tujuan bersama yang dalam tujuan tersebut saling menguntungkan kedua pihak. Prinsip atas hubungan kerjasama antar kedua pihak ini, elit pemerintah membutuhkan suntikan modal yang tentu dimiliki oleh elit ekonomi, sehingga pihak-pihak yang memiliki modal dapat memperoleh kekuasaan dari elit pemerintah serta ikut andil peran menjadi elit ekonomi. Hubungan yang terjadi antar kedua elit merupakan hubungan *State-Market*, dimana *state* diperankan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan sehingga dapat menentukan arah dalam proses keputusan politik dan mampu memberikan izin usaha kepada pihak yang memberi modal secara legal. Sedangkan *market* diperankan oleh

³¹ Stone, C. N. 1993. "Urban Regimes And The Capacity To Govern: A Political Economy Approach. *Journal of Urban Affairs*. Hal 249-260. Diakses melalui https://mesopolhis.fr/wp-content/uploads/2022/03/2.-Stone-1993-Journal_of_Urban_Affairs-2-1.pdf

pemiliki modal yang memberikan suntikan modal dan mengelola hubungan kerjasama yang nanti akan mengembalikan modal sehingga memberikan keuntungan besar bagi pihak pemilik modal. Keuntungan pemerintah yang didapatkan dari hubungan kerjasama ini dialokasikan guna mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, pemerintahan tidak akan tergantung pada suatu kontrol tertentu, melainkan terkait dengan bagaimana kebijakan dapat membawa elemen-elemen yang berbeda dalam suatu dunia yang telah terfragmentasi. Oleh karena itu, formasi rezim sebagian terkait dengan suatu evaluasi dari aktor yang memiliki terkait dengan keuntungan secara utuh maupun tidak dalam suatu format koalisi. Yang artinya bagaimana aktor-aktor dominan ini dapat memaknai kembali pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pilar terpenting pada perencanaan pembangunan, bagaimana persepsi ini dapat dikomunikasikan dengan aktor lain, dan adanya dinamika interaksi serta model pendekatan yang digunakan oleh para aktor merupakan aspek penting agar dapat memahami politik perkotaan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan subsektor hortikultura dalam perspektif ekonomi politik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 pasal 7 ayat 1(a) tentang Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 (a) meliputi: Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pertanian, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal. Sebagaimana setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah nantinya harus menguntungkan bagi berbagai pihak, khususnya untuk masyarakat. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan pemerintah dilihat melalui perspektif ekonomi politik.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasari beberapa pertimbangan yaitu, agar mampu memaparkan, menguraikan dan menjelaskan temuan data yang sesuai dengan fakta sehingga temuan data yang sesuai dengan fakta sehingga temuan-temuan tersebut nantinya akan dihubungkan dengan hasil temuan penelitian. Pemilihan jenis metode ini karena problem penelitian skripsi ini memfokuskan pada bentuk kebijakan yang seperti apa jalinan kuasa Pemerintah Kota Batu³²

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan menjadi informan maupaun narasumber yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memperoleh data penelitian. Informan maupun narasumber diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dan memberikan data yang akurat untuk penelitian ini. Berikut adalah subyek yang akan ditujukan untuk menjadi syarat data dalam penelitian ini adalah:

- a. Yusuf Effendi S.Pt selaku Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian Kota Batu
- b. Hari Dana Wahyono selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Batu
- c. Wolok Selaku Kepala Bidang Sumber Daya Alam Bagian Ekonomi Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Batu
- d. Rizaldi Selaku Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu
- e. Gunarsi selaku Ketua Kelompok Tani Buah Strawberry “Melati Putri”
- f. Gunawan selaku anggota Kelompok Tani Bunga Anggrek “Rejeki Barokah”
- g. Rupoko selaku Ketua Kelompok Tani Sayur Sawi “Karya Tani”

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan pengambilan simple dengan sengaja atau langsung menuju pada tujuan sesuai dengan sampel yang diperlukan. Dalam proses pengambilan data penulis

³² Siti Aminah dan Roikan. 2019. “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta: Pramedia Group. Hal 155.

melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dari para pihak yang menjadi informan penelitian. Lewat wawancara diharapkan peneliti akan mendapatkan data secara lebih mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Ciri khusus dari wawancara mendalam adalah keterlibatan peneliti kedalam kehidupan narasumber. Bentuk pertanyaan dalam wawancara ini adalah terstruktur dan tidak struktur. Dalam bentuk wawancara terstruktur pertanyaan yang akan ditanyakan sudah dibuat oleh peneliti sehingga peneliti hanya mengecek-list apabila pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber. Pertanyaan bersifat mendalam dari sudut pandang narasumber dan pihak narasumber dapat memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi, dan narasumber mengetahui dengan jelas bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula tentang tujuan dan maksud dari wawancara tersebut. Sedangkan, tidak struktur hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu adanya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan pedoman wawancara model ini sangat tergantung pada pewawancara.

2. Studi Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi yang didapat melalui data BPS, dokumentasi pribadi penulis, dan arsip-arsip yang telah tersedia di perusahaan dan dinas-dinas terkait.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari catatan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain yang dihimpun untuk memperoleh deskripsi secara utuh tentang kapasitas pemerintah kota menggunakan perspektif politik perkotaan. Kemudian, peneliti melakukan penentuan manakah data wawancara yang relevan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, serta mana yang tidak. Lalu dilakukan pengkategorian data berdasarkan pertanyaan yang sama, dengan jawaban informan yang berbeda-beda untuk dianalisis apakah ada kemiripan antar jawaban sebelum pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Analisis data dalam laporan penelitian ini disusun dalam pembahasan yang berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan. Proses analisis data yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang di dalam terdapat penjelasan proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan.
3. Penarikan simpulan atau verisikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenrannya, kekokohannya dan kecocokannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KOTA BATU